

## TAJUK RENCANA

### Idul Adha, Jangan Jadi Petaka

**TINGGAL** hitungan hari, Idul Adha segera tiba. Menghadapi hari besar Islam di saat pandemi ini, khususnya di tengah PPKM Darurat ini, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE), yaitu SE No 17 Tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, Salat Idul Adha & petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 H/2021M di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Isi SE tersebut sebenarnya sudah gamblang. Bagi umat Islam yang berada di wilayah Jawa-Bali, pada malam takbiran nanti tidak boleh ada takbir keliling. Begitu juga di masjid/musala tidak ada takbiran. Kegiatan mengagungkan Asma Allah untuk hari besar tersebut bisa dilakukan di rumah-rumah. Begitu juga paginya, Salat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing.

Untuk penyembelihan hewan kurban, yang disarankan agar dilaksanakan pada Hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah), pelaksanaannya tidak mungkin di RPH semua. Tampaknya juga bukan oleh jagal dan tenaga profesional semua. Kebanyakan, khususnya di kampung-kampung, penyembelihan dilakukan oleh tokoh agama sedang pengulitan hingga pencacahan dan pendistribusian dilakukan para personel tenaga sukarela yang terdiri warga sekitar.

Karena itu, di sinilah kemungkinan terjadinya penyebaran virus Korona perlu diwaspadai. Untuk itu panitia kurban harus memastikan semua personelnnya dalam keadaan sehat. Kalau ada yang demam, batuk, pilek atau flu, jangan ditutup-tutupi, yang bersangkutan harus di-suruh pulang dan tidak boleh ikut terlibat. Meski sudah dipastikan sehat, yang terlibat tetap menjaga prokes, cek suhu, pakai masker, jaga jarak, memakai alat sendiri-sendiri (satu alat jangan dipakai bersama), serta memakai lengan

panjang. Kemudian saat pendistribusian daging kurban harus menghindari kerumunan. Karena itu disarankan daging diantar ke rumah-rumah. Namun untuk di kota tampaknya tidak bisa langsung ke rumah-rumah semua, karena biasanya juga banyak warga nomaden yang menjadi penerima, misalnya pengemudi becak, pemulung, pengasong dan lainnya. Untuk itu panitia harus mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan, meski untuk itu tampaknya tidak mudah. Sebab belajar dari pembagian takjil Ramadan lalu, tempat pembagian selalu sudah dikerumuni banyak orang sejak sebelum dimulai pembagian. Karena itu pihak-pihak terkait, misalnya Satgas Covid, mestinya sudah melakukan antipasti sejak dini.

Kita berharap, Idul Adha nanti tidak menjadi sumber petaka penyebaran Covid-19. Karena itu, segala kemungkinan yang bisa terjadi mesti diantisipasi sejak kini. Meski SE Menteri Agama sudah disosialisasikan melalui berbagai media, jajaran Kemenag paling bawah (KUA), kiranya perlu mengirimkan copynya secara langsung ke masjid-masjid dan musola, termasuk petunjuk teknisnya, sehingga tidak ada yang kelewatan. Masih ada waktu untuk itu.

Begitu tempat-tempat yang setiap Idul Adha membagikan daging kurban kepada masyarakat luas, misalnya di kompleks Masjid Agung atau Masjid Raya, sejak sekarang mesti sudah dipikirkan teknisnya, sehingga tidak terjadi kerumunan apalagi desak-desakan. Juga siapkan SDM yang cukup untuk membagikan daging kurban.

Semoga pada Idul Adha nanti kita semua bisa menikmati daging kurban dengan nyaman dan bisa menambah imun tubuh kita masing-masing. Dengan daya tahan tubuh yang bagus, diharapkan kita bisa terhindar dari serangan virus Korona. Aamiin.... □

# Danais 'Migunani Tumrapping' Rakyat

## Haryadi Baskoro & Bahrul Fauzi Rosyidi

**KEMENTERIAN** Keuangan RI sudah memberi surat arahan Dana Keistimewaan (Danais) bisa digunakan untuk mendanai pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 di DIY. Surat bernomor S-121/PK/2021 tertanggal 10 Juli 2021 itu dimulai dengan menegaskan kembali bahwa Danais adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa DIY. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUK DIY, Kewenangan Istimewa itu mencakup lima urusan (1) pengisian jabatan gubernur dan wakilnya, (2) pengembangan kelembagaan pemerintah DIY, (3) kebudayaan, (4) pertanahan, (5) tata ruang.

Dapat dipahami jika Pemda DIY cukup berhati-hati dalam menggunakan dana sesuai amanat UUK. Semua pengalokasian harus tepat sasaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Kecuali itu harus serba terukur, sehingga dapat dievaluasi bagaimana *output*, *outcome* dan *impact* pada pembangunan Keistimewaan DIY.

### Masa Darurat

Adapun situasi dan kondisi DIY sekarang berada dalam masa darurat. Kasus Covid-19 DIY meroket, sementara fasilitas kesehatan yang ada tertekan semakin berat (KR, 14/7). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan mengatakan, DKI Jakarta dan DIY adalah dua provinsi yang mengalami masa berat jika penyebaran Covid-19 terus memburuk. Pandemi menciptakan darurat kesehatan dan darurat kesejahteraan. Mereka yang kini berada di garis kemiskinan bisa langsung terjun bebas menjadi kelompok miskin. Jumlah mereka tak sedikit, sekitar 70 juta jiwa (Suroto, 2021).

Darurat kesehatan harus diselesaikan lebih dulu, baru kemudian menangani darurat ekonomi. Ibarat ember yang berlubang, seberapa pun banyaknya air dipasok akan bocor keluar. Demikianlah

ember ekonomi rakyat, bantuan dana diberikan akan cepat lenyap manakala terjadi kebocoran di bidang kesehatan.

Pasal 5 ayat (1) mendaftarkan lima tujuan pengaturan Keistimewaan DIY. Fokus kita dalam masa darurat ini adalah tujuan nomor dua yaitu tujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Caranya sudah di-



sejahteraan (ekonomi). Realokasi Danais untuk urusan Covid-19 bukan berarti mengabaikan kebudayaan namun justru dalam rangka membangun dengan menanganai kebocoran.

### Posisi Tawar

Keistimewaan DIY sejatinya lebih besar dari sebatas urusan regulasi dan administrasi. Dari sejak bergabungnya Nagari Yogya ke dalam RI pada 1945 hingga lahirnya UUK DIY 2012, posisi tawar DIY sangat besar. Soal dana, sejarah mencatat bahwa Yogyakarta yang membiayai pemerintahan RI di masa revolusi (1946-1949). Ketika Ibukota RI kembali ke Jakarta, Ngarsa Dalem Sultan HB IX menyumbang 6 juta Gulden.

Kehati-hatian itu harus, transparan dan akuntabel itu mutlak, akurasi dalam alokasi adalah harga mati. Tetapi di hadapan Pemerintah Pusat janganlah *wong* Yogya menjadi *ewuh pakewuh* atau sebaliknya, mengemis dan menjilat. Inovasi pembangunan membutuhkan pola pikir *out of the box*, langkah super cepat pro-rakyat, dan *sense of emergency* yang tinggi. Dengan cara itu, pengelolaan lima urusan Keistimewaan DIY akan benar-benar *migunani tumrapping* rakyat yang kini semakin menderita.

*\* Dr Haryadi Baskoro, pakar Keistimewaan Yogya.*

*\* Bahrul Fauzi Rosyidi SE MBA CSA, Dosen Sekolah Vokasi UGM dan Direktur Gadjasora.*

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# MPLS Berkualitas di Masa Pandemi

## Adjie RP

**PANDEMI** Covid-19 belum berakhir. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang menandai awal 'kehidupan baru' para siswa baru di jenjang SMP dan SMA/SMK/MA, kembali dilaksanakan secara daring. Gubernur DIY melalui Surat Edaran (SE) 420/14001 antara lain menginstruksikan, satuan pendidikan (sekolah) agar menjaga aktivitas siswa harus berlangsung di rumah.

Jika memaknai hakikat MPLS yakni mengenal seluk beluk keadaan sekolah, visi-misi sekolah berikut program, fasilitas, warga sekolah (guru, karyawan dan kakak kelas), mengikuti secara daring tentu kurang nyaman bagi peserta didik baru. Apalagi saat berlangsung MPLS, berkemungkinan ada gangguan sinyal karena akses internet di tiap tempat berbeda-beda atau kuota yang terbatas.

Namun, makna penting MPLS, di tengah kendala apapun tetap harus dilaksanakan. Para pemangku dan pelaksana pendidikan bahkan mesti mengupayakan MPLS di masa pandemi ini harus tetap berkualitas.

### Pendidikan Keistimewaan

Upaya menyelenggarakan MPLS berkualitas sebenarnya sudah tercermin dalam Surat Edaran No 421/05820 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, yang mengatur penyelenggaraan MPLS tahun ajaran 2021/2022. Disebutkan, pelaksanaan MPLS adalah 5 hari mulai 12 Juli 2021. Materinya sekurang-kurangnya memuat profil sekolah, motivasi belajar di masa pandemi, penumbuhan karakter peserta didik, wawasan kebangsaan. Kemudian penumbuhan toleransi dan pencegahan radikalisme, kampanye pencegahan Covid-19, kesadaran tertib lalu lintas, pendidikan anti-korupsi, bahaya dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, gerakan pramuka dan lain-lain. SE juga mengingatkan pentingnya pe-

ngenalan permuseuman, pendidikan keistimewaan DIY, pendidikan berbasis budaya dan materi lain yang sesuai ke-spesifikan lokal.

Melalui MPLS, peserta didik baru mendapat motivasi agar mereka tetap memiliki semangat tinggi di tengah pandemi yang dikawatirkan justru memunculkan *learning loss* (*hilangnya semangat belajar*). *Penting dipikirkan, pelaksanaan MPLS hendaknya jangan sebatas pemberian materi atau ceramah. Meski secara daring ada baiknya dilaksanakan peng-implimentasian atas materi atau teori yang diberikan.*

Misalnya, ada tugas-tugas sederhana yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saat pemberian materi wawasan kebangsaan atau penumbuhan toleransi. Peserta didik diajak berpikir dan menjabarkan secara kongkrit bagaimana mereka bersikap toleran ketika mereka berinteraksi sehari-hari bersama teman-temannya yang berbeda suku, budaya dan agama. Hal ini penting menjadi penekanan agar budaya toleransi dapat tertanam kuat di benak.

Penumbuhan karakter disiplin, taat beribadat, jujur, menghormati orang yang lebih tua dan sesama, dan berjiwa sosial tentu tidak sulit dilakukan selama pelaksanaan MPLS. Selain ada sesi-sesi untuk berdo'a, disiplin mengikuti acara dari sesi ke sesi dan pengerjaan tugas yang tepat waktu, serta tugas kelompok

### Budaya Jawa

Sesi pendidikan berbasis budaya sebagai salah satu materi MPLS, perlu pula beroleh perha-

tian khusus untuk diulas secara mendalam dalam MPLS. Mengingat sekolah-sekolah di DIY diajak untuk semakin menghargai dan cinta terhadap Budaya Jawa dengan adanya kewajiban mengenakan pakaian Jawa *Gagrak* Ngayogyakarta Hadinigrat setiap Kamis Paing. Apa filosofi dibalik *ageman* itu, bagaimana cara mengenakannya, aturan pemakaiannya, sangat penting disosialisasikan dalam *moment* MPLS ini.

Untuk mewujudnya MPLS yang berkualitas di masa pandemi dan memberi kemanfaatan tinggi bagi peserta didik, menuntun kreativitas dari pihak sekolah dan Pengurus OSIS yang umumnya terlibat dalam mengemas dan memaknai gelaran MPLS ini.

Semoga, keterbatasan yang dialami pelaku pendidikan akibat pandemi Covid-19 tidak mengendorkan kita untuk memberikan penanaman nilai-nilai yang baik dan mulia kepada anak bangsa. □

*\* Adjie Rachmadji Primantoro SS, Guru SMA BOPKRI 1 Yogyakarta*

# Pojok KR

Walikota Solo terpapar Covid-19. -- **Siapapun bisa kena, tetap waspada!**

\*\*\*

Singapura bantu Iso Tank-Liquid Oxygen.

-- **Jangan sampai langka lagi.**

\*\*\*

Vaksinasi siswa, dekatkan ke PTM. -- **Sudah jenuh belajar via daring.**

*Berabal*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik Naskah dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak diberi jaminan kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Kesadaran Patuhi Prokes

**MENINGKATNYA** kasus Covid-19 di Yogya, salah satunya menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Artinya, masyarakat masih harus diingatkan agar mematuhi prokes.

Untuk itu, marilah kita bangun kesadaran untuk betul-betul mengikuti prokes, tidak hanya sekadar simbolis. Rasanya berbagai pihak sudah mensosialisasikan dan mengedukasi secara gencar agar masyarakat taat prokes. Namun kesadaran masyarakat masih memprihatinkan.

Kesadaran diri dan ketegasan satgas memang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penularan Covid-19 dan variannya. Bahasa 'ewuh pekuwuh', rasa tidak enak harus ditinggalkan demi memutus rantai virus dengan sungguh-sungguh.

PPKM jangan hanya di tingkat RT tapi sampai keluarga. Harus dipastikan anggota keluarga yang akan bepergian untuk selalu me-

lengkapi prokes terlebih dahulu. Kareka terkadang penggunaan masker masih setengah hati, tidak sempurna, hidung masih terbuka, ini potensi untuk tertular. Maka gunakan masker yang benar saat keluar rumah maupun berkomunikasi dengan orang lain. Kurangnya kesadaran dalam kerumunan juga masih ditemukan, seperti tidak patuh menjaga jarak yang direkomendasikan.

Perlu juga adanya kejujuran. Kalau memang badan terasa tidak sehat, sebaiknya istirahat. Apabila sudah fit betul bisa beraktivitas kembali. Begitu pula jika hasil rapid test diketahui positif lakukan isolasi mandiri.

Mari tetap *eling lan waspada* sebagai ikhtiar supaya terhindar dari virus Corona dan variannya, dan selalu tumbuhkan kesadaran diri, kejujuran dan kedisiplinan prokes dengan bersungguh-sungguh. Semoga Yogya segera membaik dan aktivitas cepat kembali normal.

*\* Eko Mulyadi MSi, Guru Fisika SMKN 3 Yogya.*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrky2@yahoo.com](mailto:iklankrky2@yahoo.com), [iklankrky13@gmail.com](mailto:iklankrky13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.